

MASALAH DAN STRATEGI MENARIK INVESTASI DI DAERAH

Oleh : Marsuki

*Seminar Investasi PUKTI,
15/06/2006, Hotel Quality, Makassar*

MASALAH DAN STRATEGI MENARIK INVESTASI DI DAERAH¹

Oleh : Marsuki²

Setelah mengalami masa sulit yang cukup lama, berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi bangsa ini telah dilancarkan berbagai pihak, terutama oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya yang diandalkan untuk merealisasikan keinginan tersebut adalah usaha untuk merangsang dapat berlangsungnya kegiatan investasi di berbagai bidang kegiatan ekonomi, di seluruh wilayah negara.

Tampaknya hal ini didasarkan pada semangat terminologi "*There is no economic growth without investment*". Artinya bahwa meskipun memang investasi bukan satu-satunya komponen yang menentukan pertumbuhan ekonomi, namun investasi dianggap sebagai komponen terpenting yang menentukan pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah. Dalam literatur ekonomi dianggap bahwa investasi mempunyai dua peran penting. Pertama bahwa investasi menentukan permintaan agregat jangka pendek, dimana ini dianggap sebagai pendorong meningkatnya output dan penyerapan tenaga kerja. Kedua, investasi menjadi penyebab utama pembentukan modal, tercermin dengan bertambahnya berbagai peralatan produksi, mesin, bangunan dan faktor lainnya. Kemudian dalam jangka panjang, kegiatan investasi tersebut akhirnya akan meningkatkan potensi output perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Itulah sebabnya maka setiap pemerintah dari suatu negara atau daerah akan selalu berusaha untuk meningkatkan kegiatan investasi di wilayahnya masing-masing. Dengan tujuan utamanya, agar aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, kesempatan kerja bertambah, pendapatan dan daya beli meningkat, dimana akhirnya penerimaan pemerintahpun akan bertambah.

Secara teoritis diterangkan bahwa ada tiga faktor dasar yang menentukan keputusan seseorang atau organisasi mau melakukan investasi. Pertama, adalah faktor seberapa besar pendapatan atau revenue yang akan didapatkan dari modal yang diinvestasikannya (*Firms invest to earn profits*). Kemudian, masalah biaya investasi, dimana terutama ditentukan oleh

¹ Disampaikan pada acara seminar PUKTI, Hotel Quality, Makassar, 15/06/2006.

² Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Program PascaSarjana Unhas. Master of Economics, DEA (1993) dan Ph.D. (1997) pada Nice University, France, dalam bidang analisa ekonomi, moneter, keuangan dan Perbankan.

faktor pajak, retribusi, suku bunga kredit, dan juga faktor biaya-biaya lainnya (pungli). Dan ketiga, faktor harapan berusaha (*Expectation*), dalam kaitannya dengan adanya persoalan-persoalan ketidak pastian akibat perubahan arah politik misalnya.

Dalam prakteknya, faktor pertama, yaitu berkenaan dengan masalah pendapatan, dihitung dengan berbagai pendekatan, seperti *present value*, *marginal efficiency of capital*, atau dengan pendekatan *capital-output ratio*. Sehingga pada dasarnya, para investor yang telah mengkalkulasi dengan baik lebih besarnya dan keuntungan dibanding dengan harapan resiko, maka rasionalnya, meskipun di suatu wilayah itu kurang aman, maka investasi akan tetap dilakukan. Kemudian dalam kaitan dengan masalah biaya investasi, maka pertimbangan nilai peluang usahalah yang menentukan pilihan yang tepat untuk berinvestasi berdasarkan kepemilikan atau keberadaan sumber daya utama dari suatu wilayah. Dalam hal ini pertimbangan investor mau menanamkan modalnya dalam suatu wilayah, setelah mereka membandingkan dari berbagai wilayah yang mampu memberikan nilai *return on investment investasi* yang tertinggi. Namun demikian, tentu saja para investor akan lebih memilih tempat berinvestasi jika mereka merasa lebih nyaman atau aman dalam wilayah yang mempunyai *country-region risk* yang rendah.

Dalam kenyataannya di Indonesia, sesuai data yang tersedia, dalam masa Orde Baru nilai investasi PMDN telah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, dimana puncaknya pada tahun 1997, mencapai nilai investasi Rp. 119 triliun dengan jumlah proyek 723 unit. Sedangkan pada masa reformasi ini akhir tahun 2004, nilai PMDN hanya mencapai Rp. 33,4 triliun dengan 158 proyek. Kemudian untuk investasi PMA pada tahun 1997, nilainya mencapai US\$ 33,7 miliar dengan 778 proyek, selanjutnya turun drastis pada tahun 2004, hanya dengan nilai US\$ 9,6 miliar dengan 1.066 proyek. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah jika mengamati perkembangan investasi antar wilayah, yang sangat timpang, dimana baik untuk PMA maupun PMDN, yang mendominasi lokasi berinvestasi terletak di pulau Jawa sejumlah 57,6% untuk PMDN dan 64,61% untuk PMA, diikuti Bali kemudian Sumatera. Sedangkan wilayah lainnya, rata-rata hanya kurang dari 10%.

Kondisi ini, jelas sangat banyak faktor yang menyebabkan sehingga menimbulkan kenyataan tersebut. Diantaranya, dianggap karena adanya kebijaksanaan yang bersifat sentralistik dan kuatnya dominasi pusat atas wilayah, yang berimplikasi pada tidak meratanya alokasi sumber-sumber daya ekonomi. Misalnya, alokasi dana pembangunan banyak terkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang padat penduduknya, sehingga mengabaikan kepentingan sarana pembangunan ekonomi di wilayah yang jarang

penduduknya. Kondisi tersebut jelas telah menciptakan daya tarik bagi para investor untuk melakukan investasi di wilayah yang sudah cukup baik sarana dan prasarannya, atau tinggi daya beli masyarakatnya, akibat lebih besarnya dana pembangunan yang diperolehnya. Jelas bahwa dari sisi prinsip keadilan atau pemerataan ekonomi, kebijaksanaan yang timpang tersebut tidak akan menguntungkan rakyat Indonesia secara keseluruhan, karena nantinya akan menimbulkan rasa apriori terhadap pusat yang selanjutnya akan menciptakan semangat desintegrasi yang akan membahayakan NKRI. Demikian pula bahwa kebijaksanaan dengan model sentralistik tersebut akan menciptakan inefisiensi dalam jangka panjang, sebab di wilayah yang sudah padat investasi akan mengalami kejenuhan investasi yang pada akhirnya akan menimbulkan *return on investment* yang rendah bagi para investor, sehingga akhirnya investasi tidak dapat lagi memberi nilai tambah yang optimal.

Berbagai problematik investasi yang demikian itu, tentunya diharapkan dapat berubah dengan berlakunya UU Otonomi Daerah pada tahun 2001 lalu. Dalam hal ini pemerintah daerah secara otonomi telah diberi keleluasaan dalam mengelola ekonominya sendiri, termasuk urusan-urusan untuk meningkatkan kegiatan investasinya, dimana itu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, swasta, ataupun masyarakat luas. Khusus misalnya dengan investasi pemerintah, maka kegiatan investasi tersebut terutama dimaksudkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang utama, disamping pemerintah dapat memperoleh pendapatan langsung dari kegiatan investasi yang dilakukan. Seerti, investasi pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, misalnya pasar, atau membentuk unit-unit bisnis BUMD yang keuntungannya dapat menambah PAD, maupun dengan cara penyertaan modal dengan unit-unit ekonomi lainnya.

Pentingnya pemerintah daerah melaksanakan kebijaksanaan menarik investasi, disebabkan karena hal tersebut akan berdampak positif langsung atau tidak langsung terhadap perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, karena dengan adanya berbagai kegiatan investasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, maka akan terbukalah peluang-peluang berusaha yang luas, kemudian dapat menyerap tenaga kerja, menambah pendapatan, serta dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Untuk kepentingan tersebut berarti pemerintah daerah khususnya berkewajiban untuk menjajakan segala potensi ekonomi yang ada di wilayahnya masing-masing. Artinya, pemerintah daerah harus mengerti dan mengetahui keinginan para investor. Dalam kenyataannya, ada beberapa daya tarik utama yang sangat menentukan para investor sehingga mau menanamkan modalnya, yakni faktor ketersediaan kekayaan sumber daya atau

endowment resources, kemudian pasar atau *market*, sumber daya manusia atau *human resources*, serta faktor teknologi atau *technology*. Hal ini berkaitan dengan faktor potensi dan struktur ekonomi suatu daerah, peluang berusaha, situasi lokasi berusaha, termasuk bagaimana aturan yang ditetapkan pemda, sikap masyarakat, atau faktor keamanan. Tapi perlu disadari bahwa berbagai hal tersebut sangat ditentukan pada akhirnya oleh faktor-faktor penentu bisnis utama mereka, seperti yang telah disebutkam sebelumnya, yaitu faktor keuntungan, biaya dan ekpektasi.

Secara rinci hasil suatu kajian KPP-OD pada tahun 2002 telah menemukan ada tujuh faktor utama di Indonesia yang dianggap sebagai faktor penentu utama suatu wilayah atau daerah sehingga investor tertarik untuk berinvestasi, yaitu faktor : (1) keamanan; (2) potensi ekonomi; (3) budaya daerah; (4) sumber daya manusia; (5) keuangan daerah; (6) infrastruktur; dan (7) pertauran daerah. Variabel-variabel kunci tersebut selanjutnya dielaborasi menjadi beberapa sub variabel. Misalnya variabel keamanan, itu dielaborasi menadi sub variabel : kepastian hukum dan gangguan keamanan. Kemudian, variabel potensi ekonomi dibagi menjadi sektor primer, sekunder, PDRB. Demikian pula dengan variabel lainnya.

Kemudian, dari hasil simulasi analisa SWOT dari kajian KPP-OD tersebut, ditemukan bahwa investasi di sektor industri misalnya, lebih banyak berlokasi di Jawa Barat dan DKI, dikarenakan di daerah ini lebih banyak kekuatan atau keunggulannya di banding dengan daerah lainnya. Seperti dari sisi pasar, sebab daerah tersebut mempunyai penduduk terbesar, baiknya infra dan suprastruktur, baiknya keamanan, dan sebagainya. Tapi tentu saja daerah-daerah tersebut mempunyai pula kelemahan, terutama dalam jangka panjang, karena pasar akan jenuh, harga input akan mahal, termasuk upah buruh, serta pencemaran akan tinggi. Sedangkan untuk daerah di luar Jawa umumnya, rupanya investasi di sektor ekstraktif, seperti kehutanan dan pertambangan sangat unggul, sehingga investasi terbesar dalam sektor tersebut ada diluar Jawa. Jadi terlihat bahwa dalam kenyataannya, masing-masing daerah mempunyai daya tarik investasinya masing-masing.

Sehingga yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan pihak legislatif dan yudikatif adalah berusaha mengoptimalkan berbagai variabel buatan atau non natural, seperti SDM, infrastruktur, aturan, budaya dan kelembagaan yang ada, dengan melakukan rekayasa secara optimal yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan daya tarik investasi di daerah mereka masing-masing. Sebab variabel natural, yang sifatnya sudah

tetap, seperti SDA, jelas sudah tidak mungkin lagi dapat diubah-ubah kondisinya, bahkan jika digunakan secara sembarono akan habis.